



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Mei 2021

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 700/3153/SJ

TENTANG

PELAKSANAAN REVIU APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH ATAS
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
RENCANA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan serta guna meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah Tahun Anggaran 2022, diminta perhatian Saudara/i atas hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa rencana pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa RKA SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain: pembangunan daerah dan keuangan daerah.
9. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 diatur bahwa kepala daerah melakukan pengawasan terhadap perangkat daerah, antara lain terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10. Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diantisipasi untuk pencegahan, antara lain:
 - a. Ketidaksesuaian:
 - 1) Kinerja program dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 dengan kinerja program RPJMD;
 - 2) Target kinerja program dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 dengan target kinerja program RPJMD;
 - 3) Target kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir RKPD dengan target kinerja kegiatan dan sub kegiatan Renstra PD;
 - 4) Kinerja kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung kinerja program;
 - 5) Rancangan KUA dan PPAS dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD;
 - 6) RKA SKPD dengan KUA dan PPAS;
 - 7) Rencana anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam KUA dan PPAS;
 - 8) Renja PD dengan RKA SKPD; dan
 - 9) Rancangan APBD dengan RKA SKPD,yang berdampak pada tidak terwujudnya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi dan pemerintah pusat, dan prioritas masing-masing daerah.

- b. Tahapan penyampaian dokumen RKPD, KUA dan PPAS, dan RKA SKPD tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berdampak pada terlambatnya penetapan Rancangan APBD dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan serta tidak tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah, mengamanatkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu terhadap dokumen RKPD dan perubahan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Perubahan Renja PD, KUA dan PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dan RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD.
12. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara/i agar memerintahkan APIP untuk melakukan reviu atas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah tahun 2022, dengan fokus pada:
- a. Rancangan Akhir RKPD, meliputi:
 - 1) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir RKPD dengan Perda tentang RPJMD;
 - 2) Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB pada rancangan akhir RKPD; dan
 - 3) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir RKPD.
 - b. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), meliputi:
 - 1) Pengujian Atas Kesesuaian Rancangan Akhir Renja PD dengan RKPD;
 - 2) Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar BAB pada Rancangan Akhir Renja PD; dan
 - 3) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja PD.
 - c. Rancangan KUA PPAS, meliputi:
 - 1) Pengujian konsistensi/keselarasan Rancangan KUA PPAS dengan Perkada RKPD;
 - 2) Pengujian kaidah penganggaran dalam KUA PPAS, meliputi:
 - a) pendapatan daerah;
 - b) belanja daerah; dan
 - c) pembiayaan daerah.
 - d. RKA SKPD, meliputi:
 - 1) Pengujian konsistensi/keselarasan RKA SKPD dengan KUA PPAS dan Perkada RKPD;
 - 2) Pengujian kaidah penganggaran dalam RKA SKPD, meliputi:
 - a) pendapatan daerah;
 - b) belanja daerah; dan
 - c) pembiayaan daerah,dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perkada RKPD.

13. Laporan hasil revidi APIP daerah sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Inspektur Jenderal untuk daerah provinsi dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk daerah kabupaten/kota yang ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan revidi selesai dilaksanakan dan menjadi syarat dalam fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.
14. Laporan hasil revidi APIP daerah sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf d, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Inspektur Jenderal untuk daerah provinsi dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk daerah kabupaten/kota yang ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan revidi selesai dilaksanakan dan menjadi syarat dalam penyampaian dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
15. Adapun jadwal dan langkah kerja APIP dalam revidi RKPD, Renja PD, KUA PPAS, dan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan format laporan hasil revidi APIP sebagaimana dimaksud pada angka 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.
16. Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan Surat Edaran ini, dapat menghubungi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telepon (021) 3849422 atau melalui Sdr. Ucok Abdulrauf Damenta (Inspektur II Itjen Kemendagri) Hp. 081398261699 atau Sdr. Arsan Latif (Inspektur IV Itjen Kemendagri) Hp. 087875732379.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908181996031001

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 700/3153/SJ
 TENTANG
 PELAKSANAAN REVIU APARAT PENGAWASAN INTERN
 PEMERINTAH ATAS PENYUSUNAN DOKUMEN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN RENCANA
 KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN JADWAL, LANGKAH KERJA DAN FORMAT KERTAS KERJA REVIU APIP
 ATAS RANCANGAN AKHIR RKPD, RANCANGAN AKHIR RENJA PD, RANCANGAN
 KUA PPAS, DAN RKA SKPD

I. JADWAL

NO	SUBSTANSI REVIU	WAKTU			KETERANGAN
		Reviu APIP	Penyampaian APIP ke KDH	Penyampaian KDH ke Mendagri c.q. Irjen	
1	Rancangan akhir RKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah	Minggu kedua bulan Mei	Paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan	-
2	Reviu rancangan akhir Renja PD Provinsi/Kabupaten/ Kota	2 (dua) minggu setelah rancangan akhir Renja PD disusun			Paralel dengan validasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Reviu rancangan KUA dan PPAS Provinsi/Kabupaten/ Kota	Sebelum diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan			-
4	Reviu RKA SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota	Minggu kedua bulan Agustus s.d. minggu keempat bulan September			Paralel dengan pembahasan yang dilakukan oleh TAPD

II. LANGKAH KERJA DAN FORMAT KERTAS KERJA REVIU APIP

Langkah kerja reviu bagi APIP sebagaimana uraian di bawah ini:

A. RANCANGAN AKHIR RKPD

1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD

a. Dapatkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan reviu rancangan akhir RKPD

NO	DOKUMEN	CATATAN REVIU			
		ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	Perda RPJMD atau dokumen perencanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				
2	Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)				
3	Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>			
4	Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD				
5	Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan				
6	Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara Perda RPJMD dan rancangan akhir RKPD				
7	Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah				
8	Peraturan Menteri teknis terkait Standar Pelayanan Minimal				

b. Yakinkan kesesuaian rumusan prioritas dan sasaran pembangunan dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD

NO	PRIORITAS DAN SASARAN DALAM PERDA RPJMD	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD	CATATAN REVIU		
			SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
	<i>(diisi dengan prioritas dan sasaran dalam Perda RPJMD)</i>	<i>(diisi dengan prioritas dan sasaran pembangunan dalam rancangan akhir RKPD)</i>	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>		

- c. Yakinkan kesesuaian pencantuman target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir RKPD dengan Perda RPJMD

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA TAHUN 2022 DI RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2022 DI RKPD	CATATAN REVIU		
					SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
	<i>(diisi dengan urusan/bidang urusan/program/kegiatan)</i>	<i>(diisi dengan indikator kinerja program)</i>	<i>(diisi target kinerja tahun 2022 di RPJMD (BAB IX))</i>	<i>(diisi target kinerja tahun 2022 di RKPD)</i>	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>		

- d. Yakinkan kesesuaian rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada BAB IV rancangan akhir RKPD telah sesuai dengan sasaran pada BAB V dan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah pada BAB VI yang ditetapkan dalam Perda RPJMD

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD	PERDA RPJMD		CATATAN REVIU		
	RUMUSAN SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PADA BAB V	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH			
				SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	<i>(diisi dengan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada BAB IV rancangan akhir RKPD)</i>	<i>(diisi dengan sasaran pada BAB V pada Perda RPJMD)</i>	<i>(diisi dengan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah pada BAB VI Perda RPJMD)</i>	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>		

- e. Yakinkan indikator dan target kinerja pada BAB VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rancangan akhir RKPD dengan BAB VIII kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Perda RPJMD (IKU dan IKD)

NO	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERDA RPJMD	CATATAN REVIU		
			SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	<i>(diisi dengan indikator dan target kinerja pada BAB VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rancangan akhir RKPD)</i>	<i>(diisi dengan BAB VIII kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Perda RPJMD)</i>	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>		

- f. Yakinkan kesesuaian program/kegiatan yang ada dalam rancangan akhir RKPD sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD	KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH	CATATAN REVIU		
			SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	<i>(diisi program/kegiatan dalam rancangan akhir RKPD)</i>	<i>(diisi klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah)</i>	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>		

- g. Yakinkan kesesuaian pencantuman indikator program kegiatan dan target dalam rancangan akhir RKPD telah sesuai dengan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri teknis terkait yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD	TARGET DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD	TARGET DALAM PERATURAN MENTERI TEKNIS TERKAIT SPM	CATATAN REVIU		
				SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	(diisi indikator program kegiatan dalam rancangan akhir RKPD)	(diisi target dalam rancangan akhir RKPD)	(diisi target dalam peraturan menteri teknis terkait SPM)	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

- h. Yakinkan kesesuaian rancangan akhir RKPD yang disusun telah mempedomani Permendagri terkait Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan rancangan akhir RKPD yang disusun telah mempedomani Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2022	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

2. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB pada rancangan akhir RKPD

- a. Yakinkan kinerja kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program RKPD dan RPJMD

NO	KINERJA PROGRAM RKPD DAN RPJMD	KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CATATAN REVIU		
			SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	(diisi dengan kinerja program RKPD dan RPJMD)	(diisi dengan kinerja kegiatan/sub kegiatan)	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

- b. Yakinkan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah pada BAB V rancangan akhir RKPD di dasarkan pada hasil identifikasi permasalahan pembangunan pada BAB II rancangan akhir RKPD

NO	ARAH KEBIJAKAN SERTA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PADA RANCANGAN AKHIR RKPD	HASIL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PADA RANCANGAN AKHIR RKPD	CATATAN REVIU		
			SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	(diisi dengan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah pada BAB V)	(diisi dengan hasil identifikasi permasalahan pembangunan pada BAB II)	(diisi sesuai dengan hasil reuiu APIP)		

- c. Yakinkan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan pada BAB V rancangan akhir RKPD di dasarkan pada isu strategis dan permasalahan pokok pembangunan pada BAB II

NO	ARAH KEBIJAKAN SERTA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PADA RANCANGAN AKHIR RKPD	ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN POKOK PEMBANGUNAN PADA RANCANGAN AKHIR RKPD	CATATAN REVIU		
			SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	(diisi dengan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah pada BAB V rancangan akhir RKPD)	(diisi dengan isu strategis dan permasalahan pokok pembangunan pada BAB II)	(diisi sesuai dengan hasil reuiu APIP)		

B. RANCANGAN AKHIR RENJA PD

1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Renja PD dengan rancangan akhir RKPD

- a. Mendapatkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan reuiu rancangan akhir Renja PD

NO	DOKUMEN	CATATAN REVIU			
		ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	Rancangan akhir RKPD				
2	Renstra PD				
3	Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya	(diisi sesuai dengan hasil reuiu APIP)			
4	Berita Acara Forum Perangkat Daerah				

NO	DOKUMEN	CATATAN REVIU			
		ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
5	Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan				
6	Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah				
7	Peraturan Menteri Teknis Terkait Standar Pelayanan Minimal				

- b. Yakinkan pemda telah menyusun Renja PD
- c. Yakinkan rumusan sasaran perangkat daerah dalam BAB III rancangan akhir Renja PD telah sesuai dengan sasaran pada BAB IV yang ditetapkan dalam rancangan akhir RKPD

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH DALAM RANCANGAN AKHIR RENJA PD	SASARAN PADA RANCANGAN AKHIR RKPD	CATATAN REVIU		
			SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	<i>(diisi dengan sasaran perangkat daerah dalam BAB III rancangan akhir Renja PD)</i>	<i>(diisi dengan sasaran pada BAB IV yang ditetapkan dalam rancangan akhir RKPD)</i>	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>		

2. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB rancangan akhir Renja PD

- a. Yakinkan tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan pada BAB III Renja PD didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada BAB II

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENJA, PROGRAM DAN KEGIATAN	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	CATATAN REVIU		
			SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	<i>(diisi dengan tujuan dan sasaran renja, program dan kegiatan pada BAB III rancangan akhir Renja PD)</i>	<i>(diisi dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada BAB II rancangan akhir Renja PD)</i>	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>		

b. Yakinkan kinerja kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program Renja PD dan Renstra PD

NO	KINERJA PROGRAM RENJA PD DAN RENSTRA PD	KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CATATAN REVIU		
			SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	(diisi kinerja program Renja PD dan Renstra PD)	(diisi dengan kinerja kegiatan/sub kegiatan)	(diisi sesuai dengan hasil reuiu APIP)		

C. RANCANGAN KUA PPAS

1. Konsistensi/keselarasan rancangan KUA PPAS dengan Perkada RKPD

a. Dapatkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan reuiu Rancangan KUA PPAS

NO	KELENGKAPAN DOKUMEN	CATATAN REVIU			
		ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	Perkada RKPD;				
2	Rancangan KUA Dan PPAS;				
3	Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;				
4	Capaian Kinerja;	(diisi sesuai dengan hasil reuiu APIP)			
5	Indikator Kinerja;				
6	Analisis standar belanja;				
7	Standar harga satuan;				
8	Standar Kebutuhan Barang;				
9	Perencanaan kebutuhan BMD;				
10	Standar Pelayanan Minimal;				
11	Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022; dan				
12	Jumlah pegawai dan struktur organisasi satuan kerja.				

- b. Yakinkan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam rancangan KUA telah sesuai dengan BAB IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam Perkada RKPD

NO	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANCANGAN KUA	BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERKADA RKPD	CATATAN REVIU		
			SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	<i>(diisi dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam rancangan KUA)</i>	<i>(diisi dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam BAB IV Perkada RKPD)</i>	<i>(diisi sesuai dengan hasil revid APIP)</i>		

- c. Yakinkan kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima manfaat perkegiatan setiap perangkat daerah serta perangkat daerah penanggung jawab dalam rancangan PPAS, dengan BAB V rencana kerja dan pendanaan daerah yang ditetapkan dalam Perkada RKPD.

NO	NAMA PROGRAM, PAGU DANA, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA, LOKASI, KELOMPOK SASARAN PENERIMA MANFAAT PER-KEGIATAN SETIAP PERANGKAT DAERAH SERTA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB DALAM RANCANGAN PPAS	BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH YANG DITETAPKAN DALAM PERKADA RKPD	CATATAN REVIU		
			SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	<i>(diisi dengan nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima manfaat per kegiatan setiap perangkat daerah serta perangkat daerah penanggung jawab dalam rancangan PPAS)</i>	<i>(diisi dengan rencana kerja dan pendanaan daerah yang ditetapkan dalam BAB V Perkada RKPD)</i>	<i>(diisi sesuai dengan hasil revid APIP)</i>		

- d. Yakinkan dalam hal penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru pada rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam Perkada RKPD, memenuhi kriteria kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Cantumkan penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru pada Rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD	(diisi sesuai dengan hasil revidi APiP)		
2	Yakinkan penambahan kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah dilengkapi dengan berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			

- e. Yakinkan dalam hal penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru pada rancangan RKA yang tidak terdapat dalam KUA PPAS, memenuhi kriteria keadaan darurat termasuk untuk keperluan mendesak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Cantumkan penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru pada Rancangan RKA yang tidak terdapat dalam KUA PPAS	(diisi sesuai dengan hasil revidi APiP)		
2	Yakinkan penambahan kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria keadaan darurat termasuk untuk keperluan mendesak			

- f. Yakinkan kesesuaian proyeksi kapasitas fiskal tahunan antara rancangan KUA PPAS dengan BAB III kerangka ekonomi dan keuangan daerah Perkada RKPD

NO	PROYEKSI KAPASITAS FISKAL TAHUNAN ANTARA RANCANGAN KUA PPAS	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH PERKADA RKPD	CATATAN REVIU		
			SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	(diisi dengan proyeksi kapasitas fiskal tahunan antara Rancangan KUA PPAS)	(diisi dengan kerangka ekonomi dan keuangan daerah pada BAB III Perkada RKPD)	(diisi sesuai dengan hasil review APIP)		

- g. Kaidah penganggaran

1) Kebijakan pendapatan daerah

a) Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU			
		ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	Yakinkan pemerintah daerah telah memiliki kebijakan pendapatan daerah				
2	Yakinkan pemerintah daerah telah memiliki kebijakan pemungutan dan mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan kegiatan pemungutan	(diisi sesuai dengan hasil review APIP)			
3	Yakinkan pemerintah daerah telah memiliki kebijakan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi				

b) Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

(1) PAD

a) Pajak daerah provinsi

1. Dapatkan target pajak daerah

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan target Pajak Kendaraan Bermotor			
2	Cantumkan target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
3	Cantumkan target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor			
4	Cantumkan target Pajak Air Permukaan			
5	Cantumkan target Pajak Rokok			

2. Yakinkan Pajak Daerah Telah Memiliki Dasar Hukum

NO	URAIAN	CATATAN REVIU			
		ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	Perda Pajak Kendaraan Bermotor				
2	Perda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)			
3	Perda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
4	Perda Pajak Air Permukaan				
5	Perda Pajak Rokok				

3. Yakinkan penetapan target pajak daerah telah berdasarkan data potensi daerah masing-masing serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan penetapan target pajak daerah telah berdasarkan data potensi daerah masing-masing serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi, melalui: a. Dapatkan kertas kerja/dokumen yang dipersamakan terkait perhitungan potensi pajak daerah dari kepala SKPKD/Badan Pendapatan Daerah b. Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai antara lain: jumlah potensi pajak daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, data inflasi	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

b) Pajak daerah kabupaten/kota

1. Dapatkan target pajak daerah

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan target pajak Hotel;			
2	Cantumkan target pajak Restoran;			
3	Cantumkan target pajak Hiburan;			
4	Cantumkan target pajak Reklame;	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
5	Cantumkan target pajak Penerangan Jalan;			
6	Cantumkan target pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;			
7	Cantumkan target pajak Parkir;			
8	Cantumkan target pajak Air Tanah;			

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
9	Cantumkan target pajak Sarang Burung Walet;			
10	Cantumkan target pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;			
11	Cantumkan target pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			

2. Yakinkan pajak daerah telah memiliki dasar hukum

NO	URAIAN	CATATAN REVIU			
		ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	Perda pajak Hotel				
2	Perda pajak Restoran				
3	Perda pajak Hiburan				
4	Perda pajak Reklame				
5	Perda pajak Penerangan Jalan	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>			
6	Perda pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				
7	Perda pajak Parkir				
8	Perda pajak Air Tanah				
9	Perda pajak Sarang Burung Walet				
10	Perda pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan				
11	Perda pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				

3. Yakinkan penetapan target pajak daerah telah berdasarkan data potensi daerah masing-masing serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan penetapan target pajak daerah telah berdasarkan data potensi daerah masing-masing serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi, melalui: a. Dapatkan kertas kerja/dokumen yang dipersamakan terkait perhitungan potensi pajak daerah dari kepala SKPKD/Badan Pendapatan Daerah b. Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai antara lain: jumlah potensi pajak daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, data inflasi	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

c) Retribusi Daerah

1. Dapatkan target retribusi daerah

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan target jenis retribusi jasa umum			
2	Cantumkan target jenis retribusi jasa usaha	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
3	Cantumkan target jenis retribusi jasa tertentu			

2. Yakinkan retribusi daerah telah memiliki dasar hukum

NO	URAIAN	CATATAN REVIU			
		ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	Perda mengenai jenis retribusi jasa umum				
2	Perda mengenai jenis retribusi jasa usaha	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)			
3	Perda mengenai jenis retribusi jasa tertentu				

3. Yakinkan penetapan target retribusi daerah telah berdasarkan data potensi daerah masing-masing serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan penetapan target retribusi daerah telah berdasarkan data potensi daerah masing-masing serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi, melalui: a. Dapatkan kertas kerja/dokumen yang dipersamakan terkait perhitungan potensi retribusi daerah dari Kepala SKPD yang memungut retribusi b. Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai antara lain: jumlah potensi retribusi jasa umum daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan data inflasi	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

d) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Dapatkan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, atas hasil penyertaan modal daerah antara lain:			
	a. Bagian laba dari BUMD	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
	b. Kerja sama dengan pihak ketiga			

2. Yakinkan bahwa data penyertaan modal telah diatur dalam Perda

NO	URAIAN	CATATAN REVIU			
		ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	Perda mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)			

3. Yakinkan data penyertaan modal telah sesuai dengan ketentuan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU			
		YA/ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	Dapatkan data penyertaan modal pada BUMD/BUMN/Swasta				
2	Bandingkan antara target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan penyertaan modal	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)			
3	Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai				

e) Lain-lain PAD yang sah

1. Dapatkan target lain-lain PAD yang sah

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan target hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan			
2	Cantumkan target hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan			
3	Cantumkan target hasil kerja sama daerah	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
4	Cantumkan target jasa giro			
5	Cantumkan target hasil pengelolaan dana bergulir			
6	Cantumkan target pendapatan bunga			
7	Cantumkan target penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah			
8	Cantumkan target penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah			

2. Yakinkan penganggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan telah sesuai dengan ketentuan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan penjualan BMD merupakan salah satu bentuk pemindahtanganan adalah BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah			
2	Yakinkan BMD yang telah dipindahtangankan yang didukung dengan Keputusan Kepala Daerah	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
3	Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai			

3. Yakinkan penganggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan telah sesuai dengan ketentuan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan BMD yang dimanfaatkan oleh pihak lain tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi BMD tidak mengubah status kepemilikan			
2	Yakinkan pemanfaatan BMD telah didukung dengan Keputusan Kepala Daerah	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>		
3	Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai			

4. Yakinkan penganggaran hasil kerja sama daerah telah sesuai dengan ketentuan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan pelaksanaan kerja sama daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
2	Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>		

- f) Yakinkan penganggaran atas lain-lain PAD yang sah selain di atas telah sesuai dengan ketentuan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai			
2	Jasa Giro			

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>		
4	Pendapatan Bunga			
5	Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah			
6	Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing			
7	Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah			
8	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan			
9	Pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah			
10	Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian			
11	Pendapatan dari BLUD			

(2) Pendapatan transfer

a) Transfer pemerintah pusat

1. Dapatkan target transfer pemerintah pusat

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan target dana perimbangan			
2	Cantumkan target dana insentif daerah	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>		

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
3	Cantumkan target otonomi khusus			
4	Cantumkan target dana keistimewaan			
5	Cantumkan target dana desa			

2. Yakinkan transfer pemerintah pusat telah memiliki dasar hukum

NO	URAIAN	CATATAN REVIU			
		ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	dana perimbangan				
2	dana insentif daerah	(diisi sesuai dengan hasil reuiu APIP)			
3	otonomi khusus				
4	dana keistimewaan				
5	dana desa				

b) Transfer Antar Daerah

1. Dapatkan target transfer antar daerah

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan target pendapatan bagi hasil			
2	Cantumkan target bantuan keuangan	(diisi sesuai dengan hasil reuiu APIP)		

2. Yakinkan target transfer antar daerah telah memiliki dasar hukum

NO	URAIAN	CATATAN REVIU			
		ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	Pendapatan bagi hasil				
2	Bantuan keuangan	(diisi sesuai dengan hasil reuiu APIP)			

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

(1) Dapatkan target lain-lain pendapatan daerah yang sah

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan target hibah			
2	Cantumkan dana darurat	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

(2) Yakinkan Penetapan Target Hibah Telah Memiliki Dasar Hukum

NO	URAIAN	CATATAN REVIU			
		ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	Peraturan terkait target hibah				
2	Peraturan terkait dana darurat	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)			

2) Kebijakan belanja daerah

a) Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

(1) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		KETERANGAN	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Sajikan data jumlah alokasi anggaran untuk mendukung/sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintahan			
2	Sajikan data jumlah alokasi anggaran untuk mendukung/sinergitas program pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintahan	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

- (2) Yakinkan telah terdapat kebijakan alokasi belanja untuk pengadaan barang dan jasa telah mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	URAIAN	CATATAN REVIU			
		ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	Keputusan Kepala Daerah				
2	Dst.	(diisi sesuai dengan hasil revid APIP)			

- (3) Yakinkan alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan telah sesuai, antara lain:

NO	URAIAN	CATATAN REVIU			
		YA/ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	Pendidikan				
	a. Cantumkan besaran belanja daerah fungsi pendidikan				
	b. Dapatkan perhitungan alokasi fungsi pendidikan	(diisi sesuai dengan hasil revid APIP)			
	c. Yakinkan, alokasi anggaran fungsi pendidikan telah mencapai paling sedikit 20% dari belanja daerah				
2	Kesehatan				
	a. Cantumkan besaran belanja daerah fungsi kesehatan				
	b. Dapatkan perhitungan alokasi fungsi Kesehatan				
	c. Yakinkan, alokasi anggaran bidang kesehatan telah mencapai paling sedikit 10% dari total belanja daerah diluar gaji				
3	Infrastruktur				
	a. Cantumkan besaran belanja infrastruktur daerah				
	b. Dapatkan persentase perhitungan Infrastruktur daerah				

NO	URAIAN	CATATAN REVIU			
		YA/ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
	c. Yakinkan, alokasi anggaran infrastruktur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
4	Pengawasan				
	a. Cantumkan besaran belanja daerah fungsi pendidikan				
	b. Yakinkan, alokasi anggaran pengawasan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
5	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)				
	a. Cantumkan besaran belanja daerah untuk Peningkatan Kompetensi SDM				
	b. Yakinkan, alokasi anggaran peningkatan kompetensi SDM telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				

(4) Yakinkan dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, pemerintah daerah telah sesuai ketentuan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
	Yakinkan dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, pemerintah daerah telah berpedoman pada:			
a	Standar harga satuan regional	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
b	Analisis standar belanja			
c	Rencana Barang Kebutuhan Milik Daerah			
d	Standar teknis lainnya yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

b) Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

(1) Rencana belanja operasi

(a) Dapatkan rencana belanja operasi

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan belanja pegawai, antara lain:			
	a. Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH)			
	b. Penghasilan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)			
	c. Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)			
	d. Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
	e. Insentif pemungutan pajak daerah			
	f. Insentif pemungutan retribusi daerah			
2	Cantumkan belanja barang dan jasa			
3	Cantumkan besaran belanja bunga			
4	Cantumkan besaran belanja subsidi			
5	Cantumkan jumlah besaran belanja hibah			
6	Cantumkan besaran belanja bantuan sosial			

(b) Yakinkan rencana belanja pegawai telah sesuai ketentuan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA/SESUAI	TIDAK ADA/ TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Gaji KDH/WKDH			
	Yakinkan besaran gaji KDH/WKDH telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
2	Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA/SESUAI	TIDAK ADA/ TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
	a. Yakinkan anggaran penghasilan pimpinan dan anggota DPRD telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
	b. Yakinkan besaran anggaran penghasilan pimpinan dan anggota DPRD yang dialokasikan telah sesuai dengan jumlah pimpinan dan anggota DPRD			
3	Gaji ASN			
	Yakinkan besaran anggaran gaji ASN yang dialokasikan telah sesuai dengan jumlah ASN			
4	TPP ASN			
	Yakinkan besaran anggaran TPP ASN yang dialokasikan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
5	Insentif pemungutan pajak daerah			
	Dapatkan data SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah			
6	Insentif pemungutan retribusi daerah			
	a. Dapatkan data SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah			
	b. Yakinkan besaran insentif pajak dan retribusi daerah ditetapkan sesuai dengan rencana penerimaan dalam APBD			
	c. Yakinkan penerima dan besarnya pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah telah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah			
7	Belanja barang dan jasa			

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA/SESUAI	TIDAK ADA/ TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
	a. Yakinkan bahwa belanja barang dan jasa dimaksud tidak memenuhi kriteria belanja modal			
	b. Yakinkan belanja barang digunakan untuk menggarkan belanja barang yang masa manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga			
	c. Yakinkan barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam rancangan akhir RPJMD			
8	Belanja bunga			
	Yakinkan pembayaran bunga hutang yang telah dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman			
9	Belanja subsidi			
	Yakinkan belanja subsidi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
10	Belanja hibah			
	a. Yakinkan penerima hibah tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
	b. Yakinkan alokasi belanja hibah dicantumkan dalam RKPD yang ditetapkan oleh kepala daerah			

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA/SESUAI	TIDAK ADA/ TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
	c. Yakinkan belanja hibah dianggarkan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
11	Belanja bantuan sosial			
	Yakinkan belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan			

(2) Belanja modal

(a) Dapatkan rencana belanja modal

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (RP)
	Cantumkan rencana Belanja Modal:			
1	Belanja Tanah			
2	Belanja Peralatan dan Mesin	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
3	Belanja Gedung dan Bangunan			
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
5	Belanja Aset Tetap Lainnya			

(b) Yakinkan rencana belanja pegawai telah sesuai ketentuan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA/SESUAI	TIDAK ADA/TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan KDH telah menetapkan standar kebutuhan dan standar barang sebagai pedoman perencanaan kebutuhan			
2	Yakinkan pengguna barang telah mengajukan rencana kebutuhan BMD kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
3	Yakinkan Sekretaris Daerah telah meneliti dan menyetujui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)			
4	Yakinkan RKBMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta kesedian BMD			

(3) Belanja Tidak Terduga (BTT)

(a) Dapatkan rencana BTT

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (RP)
1	Cantumkan rencana BTT	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

(b) Yakinkan rencana BTT telah sesuai ketentuan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA/SESUAI	TIDAK ADA/TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan alokasi BTT di anggarkan secara memadai			
2	Yakinkan alokasi BTT telah memperhitungkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA/SESUAI	TIDAK ADA/TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
	kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan			

(4) Belanja transfer

(a) Dapatkan rencana belanja transfer

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (RP)
1	Cantumkan rencana belanja transfer			
	a. Belanja bagi hasil provinsi ke kabupaten/kota	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
	b. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa			

(b) Yakinkan rencana belanja transfer telah sesuai ketentuan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA/SESUAI	TIDAK ADA/TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan dana bagi hasil pajak daerah provinsi sesuai dengan realisasi penerimaan			
2	Yakinkan dana bagi hasil pajak daerah provinsi sudah termasuk atas kelebihan realisasi penerimaan tahun anggaran sebelumnya	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

3	Yakinkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota sesuai dengan realisasi penerimaan			
4	Yakinkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota sudah termasuk atas kelebihan realisasi penerimaan tahun anggaran sebelumnya			

3) Kebijakan pembiayaan daerah

a) Kebijakan penerimaan pembiayaan

(1) Dapatkan besaran penerimaan pembiayaan daerah

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (RP)
1	Cantumkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
2	Cantumkan pencairan dana cadangan			
3	Cantumkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
4	Cantumkan penerimaan pinjaman daerah			
5	Cantumkan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
6	Cantumkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

(2) Yakinkan besaran penerimaan pembiayaan daerah telah sesuai ketentuan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA/SESUAI	TIDAK ADA/TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan alokasi besaran penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
2	Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

b) Kebijakan pengeluaran pembiayaan

(1) Dapatkan besaran pengeluaran pembiayaan daerah

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (RP)
1	Cantumkan pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo			
2	Cantumkan penyertaan modal daerah			
3	Cantumkan pembentukan dana cadangan	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
4	Cantumkan pemberian pinjaman daerah			
5	Cantumkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			

(2) Yakinkan besaran pengeluaran pembiayaan daerah telah sesuai ketentuan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA/SESUAI	TIDAK ADA/TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan pengeluaran pembiayaan daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan surplus			
2	Pembayaran cicilan pokok hutang agar disesuaikan dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari keseluruhan kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman			
3	Penyertaan modal daerah pada BUMD dan /atau BUMN telah memiliki dasar hukum, jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda penyertaan modal sebelum persetujuan bersama antara KDH dan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
4	Yakinkan pengeluaran pembiayaan antara lain penyertaan modal telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-			

	undangan yang mengatur mengenai investasi pemerintah daerah			
5	Yakinkan alokasi anggaran untuk pembentukan dana cadangan yang digunakan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
6	Yakinkan pemberian pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman			
7	Yakinkan pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
8	Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai antara lain			

D. RKA SKPD

1. Pengujian atas kelengkapan dokumen

Dapatkan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan reviu RKA SKPD

NO	DOKUMEN	CATATAN REVIU			
		ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	Perkada RKPD				
2	Rancangan akhir KUA dan PPAS				
3	RKA SKPD				
4	Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)			

NO	DOKUMEN	CATATAN REVIU			
		ADA	TIDAK	KETERANGAN	REKOMENDASI
5	Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya				
6	Capaian kinerja				
7	Indikator kinerja				
8	Analisis standar belanja				
9	Standar harga satuan				
10	Standar kebutuhan barang				
11	Perencanaan kebutuhan BMD				
12	Standar Pelayanan Minimal				
13	Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan				
14	Jumlah pegawai dan struktur organisasi satuan kerja				
15	<i>Term Of Reference</i> (TOR) per kegiatan				
16	Informasi harga tanah/NJOP dari Dinas Pendapatan Daerah setempat				
17	Izin prinsip pembangunan gedung dari pemerintah daerah				
18	Status kepemilikan tanah				
19	Surat Dinas PU terkait perhitungan kebutuhan biaya pembangunan gedung atau sejenisnya untuk Pengadaan Gedung/Bangunan dan/atau perhitungan kebutuhan biaya renovasi gedung negara/ sejenisnya				
20	Surat keterangan, berita acara penghapusan kendaraan				
21	Data Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk mengetahui luas, jumlah, dan kondisi BMD				
22	Data mengenai perhitungan biaya pemeliharaan				
23	Dokumen perencanaan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu				

2. Yakinkan dalam hal penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru pada RKA SKPD yang tidak terdapat dalam PPAS, memenuhi kriteria kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Cantumkan penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru pada rancangan RKA SKPD yang tidak terdapat dalam PPAS	(diisi sesuai dengan hasil revid APiP)		
2	Yakinkan penambahan kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah dilengkapi dengan berita acara kesepakatan kepala daerah dengan ketua DPRD.			

3. Pengujian atas kewajaran alokasi anggaran pendapatan daerah

a. PAD

1) Pajak daerah provinsi

a) Dapatkan alokasi anggaran pajak daerah provinsi dalam RKA SKPD

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan target pajak kendaraan bermotor			
2	Cantumkan target bea balik nama kendaraan bermotor	(diisi sesuai dengan hasil revid APiP)		
3	Cantumkan target pajak bahan bakar kendaraan bermotor			
4	Cantumkan target pajak air permukaan			
5	Cantumkan target pajak rokok			

- b) Yakinkan besaran target pajak dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS dan didukung dokumen yang memadai

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan besaran target pajak dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS			
2	Yakinkan penetapan target pajak daerah telah berdasarkan data potensi daerah masing-masing serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi, melalui: a. Dapatkan kertas kerja/dokumen yang dipersamakan terkait perhitungan potensi pajak daerah dari kepala SKPKD/Badan Pendapatan Daerah b. Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai antara lain: jumlah potensi pajak daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, data inflasi	(diisi sesuai dengan hasil reuiu APIP)		

2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota

- (a) Dapatkan alokasi anggaran pajak daerah kabupaten/kota dalam RKA SKPD

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (RP)
1	Cantumkan terget pajak hotel			
2	Cantumkan terget pajak restoran			
3	Cantumkan terget pajak hiburan			
4	Cantumkan terget pajak reklame	(diisi sesuai dengan hasil reuiu APIP)		
5	Cantumkan terget pajak penerangan jalan			
6	Cantumkan terget pajak mineral bukan logam dan batuan			
7	Cantumkan terget pajak parkir			
8	Cantumkan terget pajak air tanah			
9	Cantumkan terget pajak sarang burung walet			
10	Cantumkan terget pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan			

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (RP)
11	Cantumkan target pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan			

(b) Yakinkan besaran target pajak dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS dan didukung dokumen yang memadai

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan besaran target pajak dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS			
2	Yakinkan penetapan target pajak daerah telah berdasarkan data potensi daerah masing-masing serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi, melalui: a. Dapatkan kertas kerja/dokumen yang dipersamakan terkait perhitungan potensi pajak daerah dari kepala SKPKD/Badan Pendapatan Daerah b. Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai antara lain: jumlah potensi pajak daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, data inflasi	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

3) Rertibusi

(a) Dapatkan alokasi anggaran retribusi daerah dalam RKA SKPD

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan target jenis retribusi jasa umum			
2	Cantumkan target jenis retribusi jasa usaha	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
3	Cantumkan target jenis retribusi jasa tertentu			

(b) Yakinkan besaran target retribusi daerah dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan besaran target retribusi daerah dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS			
2	Yakinkan penetapan target reribusi daerah telah berdasarkan data potensi daerah masing-masing serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi, melalui: a. Dapatkan kertas kerja/dokumen yang dipersamakan terkait perhitungan potensi retribusi daerah dari kepala SKPD yang memungut retribusi b. Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai antara lain: Jumlah potensi retribusi jasa umum daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan data inflasi	(diisi sesuai dengan hasil reuiu APIP)		

4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

(a) Dapatkan alokasi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam RKA SKPD

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (RP)
1	Cantumkan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	(diisi sesuai dengan hasil reuiu APIP)		

(b) Yakinkan besaran target pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan besaran target pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS			
2	Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai	(diisi sesuai dengan hasil reuiu APIP)		

5) Lain-lain PAD yang sah

(a) Dapatkan target lain-lain PAD yang sah dalam RKA SKPD

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (RP)
1	Cantumkan target hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan			
2	Cantumkan target hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan			
3	Cantumkan target hasil kerja sama daerah	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>		
4	Cantumkan target jasa giro			
5	Cantumkan target hasil pengelolaan dana bergulir			
6	Cantumkan target pendapatan bunga			
7	Cantumkan target penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah			
8	Cantumkan target penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah			

(b) Yakinkan besaran target lain-lain PAD yang sah dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan besaran target lain-lain PAD yang sah dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS			
2	Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>		

b. Pendapatan Transfer

1) Transfer Pemerintah Pusat

a) Dapatkan target transfer pemerintah pusat dalam RKA SKPD

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan target dana perimbangan			
2	Cantumkan target dana insentif daerah	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
3	Cantumkan target otonomi khusus			
4	Cantumkan target dana keistimewaan			
5	Cantumkan target dana desa			

b) Yakinkan besaran transfer pemerintah pusat dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan besaran transfer pemerintah pusat dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS			
2	Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

2) Transfer antar daerah

(a) Dapatkan target transfer antar daerah dalam RKA SKPD

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan target pendapatan bagi hasil			
2	Cantumkan target bantuan keuangan	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

(b) Yakinkan besaran transfer pemerintah pusat dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan besaran transfer antar daerah dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS			
2	Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Dapatkan target lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam RKA SKPD

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan target hibah			
2	Dana darurat	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

2) Yakinkan besaran transfer pemerintah pusat dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan besaran transfer antar daerah dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS			
2	Yakinkan perhitungan dalam kertas kerja telah didukung dengan dokumen yang memadai	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

4. Pengujian atas kewajaran alokasi anggaran belanja daerah

a. Rencana belanja operasi dalam RKA SKPD

1) Dapatkan rencana belanja operasi dalam RKA SKPD

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan belanja pegawai, antara lain:			
	a. Gaji KDH/WKDH			
	b. Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD			
	c. Gaji ASN			
	d. TPP ASN	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
	e. Insentif pemungutan pajak daerah			
	f. Insentif pemungutan retribusi daerah			
2	Cantumkan belanja barang dan jasa			
3	Cantumkan besaran belanja bunga			
4	Cantumkan besaran belanja subsidi			
5	Cantumkan jumlah besaran belanja hibah			
6	Cantumkan besaran belanja bantuan sosial			

2) Yakinkan rencana belanja operasi dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS dan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan belanja operasi dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS			
2	Lakukan penelusuran kesesuaian belanja dengan dokumen pendukung TOR	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
3	Yakinkan kesesuaian biaya pemeliharaan kendaraan dengan jumlah kendaraan dinas sesuai dengan daftar BMD			
4	Yakinkan biaya pemeliharaan gedung/bangunan atau renovasi telah dilengkapi dengan perhitungan kebutuhan biaya pemeliharaan/renovasi bangunan/gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

5	Yakinkan besaran belanja operasi telah sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah			
6	Yakinkan kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran (<i>output</i>) kegiatan telah memperhatikan asas kepatutan dalam pengalokasian anggaran disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah			

b. Rencana belanja modal dalam RKA SKPD

1) Dapatkan rencana belanja operasi dalam RKA SKPD

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan rencana belanja modal:			
	a. Belanja tanah			
	b. Belanja peralatan dan mesin	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
	c. Belanja gedung dan bangunan			
	d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan			
	e. Belanja aset tetap lainnya			

2) Yakinkan rencana belanja modal dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS dan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan belanja modal dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS			
2	Lakukan penelusuran kesesuaian belanja dengan dokumen pendukung TOR			
3	Yakinkan kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran (<i>output</i>) kegiatan telah memperhatikan asas kepatutan dalam pengalokasian anggaran disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
	BELANJA TANAH			

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan perencanaan pengadaan tanah yang dibuat oleh satker, pastikan apakah rencana pengadaan tanah tersebut telah didasarkan usulan kuasa pengguna barang dan memperhatikan ketersediaan LBMD/KIB, laporan keuangan perangkat daerah, yang ada pada badan/biro pengelola aset.			
2	Pastikan kesesuaian TOR, Rincian Anggaran dan Belanja (RAB), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah			
3	Pastikan kesesuaian biaya operasional dan biaya pendukung serta honorarium dengan standar biaya sesuai Petauran Kepala Daerah tentang Standar Harga			
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN				
1	Yakinkan SPTJM telah memuat:			
	a. pernyataan telah memenuhi kelayakan teknis			
	b. ketersediaan dana bagi pelaksanaan kontrak tahun jamak yang bukan merupakan tambahan pagu (<i>on top</i>)			
2	Yakinkan kontrak tahun jamak, pastikan apakah atas permohonan kontrak tahun jamak telah mendapat persetujuan kepala daerah			
3	Untuk pekerjaan yang membutuhkan pembebasan/pengadaan lahan seperti pekerjaan pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan lahan/tanah dalam jumlah besar, antara lain bandara, pelabuhan, jalan, irigasi, transmisi listrik, dan rel kereta api, pastikan apakah SPTJM Telah dilampiri:			
	Pernyataan bahwa pengguna anggaran akan menyelesaikan pengadaan/pembebasan lahan/tanah	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
	Pernyataan bahwa pengguna anggaran akan menjaga			

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
	Pernyataan bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian pengadaan/pembebasan lahan/tanah tidak dapat dibebankan pada APBD, kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
4	Pastikan apakah telah terdapat perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
5	Pastikan apakah telah terdapat analisis kebutuhan mengenai rencana pengadaan gedung/ bangunan yang diusulkan oleh satuan kerja			
6	Pastikan bahwa dokumen pendukung yang diajukan:			
	dilengkapi dengan cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun;			
	tidak diperbolehkan terdapat dokumen yang menunjukkan nama calon peserta dan/atau calon pemenang lelang.			
BELANJA PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR				
1	Bandingkan antara jumlah kendaraan dinas yang dimiliki oleh satuan kerja serta kondisinya dalam LBMD/KIB, dengan jumlah jabatan dalam struktur organisasi satuan kerja tersebut.			
2	Untuk penggantian kendaraan yang rusak berat yang secara ekonomis memerlukan biaya pemeliharaan yang besar untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak diusulkan biaya pemeliharannya, pastikan terdapat surat keterangan berupa berita acara penghapusan kendaraan/pelelangan.	(diisi sesuai dengan hasil reuiu APiP)		

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
3	Untuk pengadaan kendaraan bermotor yang dibatasi, pastikan apakah terdapat surat izin dari pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian			

c. Rencana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam RKA SKPD

1) Dapatkan rencana BTT

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan rencana BTT	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>		

2) Yakinkan besaran BTT dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS dan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
	Yakinkan besaran BTT dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>		

d. Rencana belanja transfer dalam RKA SKPD

1) Dapatkan rencana belanja transfer

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan rencana belanja transfer:			
	a. Belanja bagi hasil provinsi ke kabupaten/kota	<i>(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)</i>		
	b. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa			

- 2) Yakinkan besaran BTT dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS dan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan besaran BTT dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS dan ketentuan peraturan perundang-undangan	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

5. Pengujian atas kewajaran alokasi anggaran pembiayaan daerah

a. Kebijakan penerimaan pembiayaan

- 1) Dapatkan besaran penerimaan pembiayaan daerah

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (Rp)
1	Cantumkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
2	Cantumkan pencairan dana cadangan			
3	Cantumkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
4	Cantumkan penerimaan pinjaman daerah			
5	Cantumkan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
6	Cantumkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

- 2) Yakinkan besaran penerimaan pembiayaan dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS dan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan besaran BTT dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS dan ketentuan peraturan perundang-undangan	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

6. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

a. Dapatkan besaran pengeluaran pembiayaan daerah

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		ADA	TIDAK	NILAI (RP)
1	Cantumkan pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo			
2	Cantumkan penyertaan modal daerah	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		
3	Cantumkan pembentukan dana cadangan			
4	Cantumkan pemberian pinjaman daerah			
5	Cantumkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			

b. Yakinkan besaran penerimaan pembiayaan dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS dan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN REVIU		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	Yakinkan besaran penerimaan pembiayaan dalam RKA SKPD telah sesuai dengan KUA PPAS dan ketentuan peraturan perundang-undangan	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)		

III. HAL-HAL LAINNYA

1. Pimpinan perangkat daerah terkait atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus segera menindaklanjuti rekomendasi dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) APIP dengan melakukan koreksi/penyempurnaan.
2. Dalam masa pelaksanaan reviu, APIP memantau dan meyakinkan apakah rekomendasi dalam CHR tersebut telah ditindaklanjuti oleh pimpinan perangkat daerah terkait atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
3. Apabila rekomendasi APIP tidak ditindaklanjuti, Tim Reviu memberikan simpulan atas status rekomendasi tersebut sebagai bahan dalam mengeluarkan laporan hasil reviu, dengan contoh formulir sebagai berikut:

NO	LANGKAH KERJA	CATATAN HASIL REVIU			TINDAK LANJUT PIMPINAN OPD/TAPD	SIMPULAN ATAS TINDAK LANJUT	
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI		SESUAI	TIDAK SESUAI
	(diisi dengan seluruh langkah kerja sesuai dengan romawi II)	(diisi sesuai dengan hasil reviu APIP)			(diisi tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pimpinan OPD/TAPD)	(diisi oleh APIP apakah tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pimpinan OPD/TAPD telah sesuai atau tidak)	

4. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 3, menjadi lampiran dokumen Laporan Hasil Reviu Renja PD dan RKPD yang disampaikan kepala daerah kepada Tim Fasilitasi Rancangan Keputusan Kepala Daerah mengenai RKPD Tahun 2022 serta dokumen LHR KUA PPAS dan RKA SKPD kepada Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun 2022.
5. Tim Fasilitasi Rancangan Keputusan Kepala Daerah mengenai RKPD Tahun 2022 dan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun 2022 harus memperhatikan dan melakukan klarifikasi terhadap rekomendasi APIP dalam LHR yang tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan perangkat daerah terkait atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908181996031001